



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1866-1873

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Sakaria¹, Asri Jaya², Nurlina³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹Chakha128@gmail.com, ²asrijava@unismuh.ac.id, ³nurlinafebis@gmail.com

Abstrak

Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan permasalahan administratif yang berdampak luas pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, sistem dan teknologi informasi, prosedur administrasi, serta budaya organisasi terhadap keterlambatan penerbitan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan populasi seluruh pegawai BPKD Kabupaten Gowa yang berjumlah 40 orang dan menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 29. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel. Uji asumsi klasik menunjukkan data berdistribusi normal dan bebas dari multikolinearitas serta heteroskedastisitas. Berdasarkan analisis regresi, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,531 berarti keempat variabel independen mampu menjelaskan 53,1% variasi keterlambatan penerbitan SP2D. Secara parsial, sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,247$; sig. 0,031) dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,136$; sig. 0,040) terhadap keterlambatan penerbitan SP2D. Sementara itu, sistem dan teknologi informasi (sig. 0,138) serta prosedur administrasi (sig. 0,099) tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan ($F = 10,366$; sig. 0,000). Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan budaya organisasi yang disiplin untuk mempercepat proses penerbitan SP2D.

Kata kunci: SP2D, Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Regresi Linear Berganda

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu instrumen krusial dalam siklus keuangan daerah adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar hukum pencairan dana dari kas daerah. SP2D menjadi tahapan akhir dari rangkaian proses pengeluaran anggaran setelah melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam sistem administrasi keuangan daerah, SP2D memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi administratif sebagai dasar perintah pembayaran resmi, fungsi akuntansi sebagai bukti transaksi keuangan yang sah, dan fungsi kontrol fiskal sebagai alat pengawasan internal atas kesesuaian pengeluaran dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa SP2D diterbitkan paling lambat satu hari kerja setelah SPM yang lengkap diterima. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2023) bahkan menetapkan standar maksimal satu jam untuk penerbitan SP2D sejak dokumen SPM diterima secara lengkap. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan menyebabkan proses ini berlangsung lebih lama dari standar yang ditetapkan, sehingga mengganggu penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah [1].

Fenomena keterlambatan SP2D tidak berdampak pada tertundanya pencairan dana, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik daerah secara keseluruhan. Laporan BPK RI (2022) mencatat bahwa efektivitas penyerapan anggaran di beberapa pemerintah daerah Sulawesi Selatan menjadi indikator utama penilaian kinerja keuangan daerah. Keterlambatan yang berulang berpotensi menimbulkan

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

fenomena year-end rush, yaitu lonjakan realisasi anggaran di akhir tahun yang tidak selalu disertai kualitas output yang memadai, serta menyebabkan budget idle atau dana menganggur di kas daerah yang mengurangi potensi optimalisasi anggaran [2]. Kondisi ini secara langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu.

Berbagai faktor organisasional yang diduga berkontribusi terhadap keterlambatan penerbitan SP2D meliputi: kompetensi dan disiplin sumber daya manusia (SDM), kualitas dan keandalan sistem serta teknologi informasi (TI), kompleksitas prosedur administrasi, serta nilai dan budaya organisasi yang berlaku. Faktor SDM mencakup kemampuan teknis, pemahaman regulasi keuangan daerah, dan ketelitian pegawai dalam memproses dokumen. Sistem dan TI berkaitan dengan ketersediaan, keandalan, dan kemudahan penggunaan aplikasi keuangan seperti SIPD dan SPAN. Prosedur administrasi menyangkut kejelasan SOP, kepatuhan terhadap alur, dan kecepatan proses verifikasi. Sementara budaya organisasi merefleksikan disiplin kerja, komitmen pegawai, dan pola koordinasi antarpejabat dalam proses penerbitan SP2D [3, 4].

Penelitian Eriva et al. (2023) pada BKUD Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan penerbitan SP2D [3]. Madsani & As'ad (2025) menemukan bahwa efektivitas penerbitan SP2D di Jakarta Pusat dipengaruhi oleh beban kerja, kualitas sistem, dan koordinasi antarpejabat [4]. Sementara Pertiwi et al. (2025) menemukan bahwa SDM berkualitas, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berkontribusi pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah [5]. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan di konteks yang berbeda, sehingga replikasi dengan fokus pada BPKD Kabupaten Gowa menjadi penting untuk mengkonfirmasi atau memperluas temuan yang ada.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagai pengelola keuangan daerah yang strategis. Berlokasi di Jl. Masjid Raya No. 34, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, BPKD Kabupaten Gowa mengelola seluruh siklus keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, BPKD menghadapi tantangan dalam menjaga ketepatan waktu penerbitan SP2D di tengah beban kerja yang tinggi dan proses digitalisasi sistem keuangan yang sedang berjalan. Kajian yang secara spesifik menyoroti keterlambatan SP2D di lingkungan BPKD Kabupaten Gowa masih sangat terbatas, sehingga menjadi celah penelitian yang perlu diisi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh sumber daya manusia (X1), sistem dan teknologi informasi (X2), prosedur administrasi (X3), dan budaya organisasi (X4) terhadap keterlambatan penerbitan SP2D (Y) pada BPKD Kabupaten Gowa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian di bidang manajemen keuangan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi pengelola keuangan daerah dalam meningkatkan efisiensi layanan administrasi keuangan dan mempercepat siklus penerbitan SP2D sesuai standar yang ditetapkan regulasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan mengetahui dan mengukur hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengolahan data numerik dengan metode statistik [6]. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis yang terstruktur, pengukuran variabel secara numerik, dan generalisasi hasil terhadap populasi. Lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Jl. Masjid Raya No. 34, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, yang dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai BPKD Kabupaten Gowa yang terlibat langsung dalam proses penerbitan SP2D, berjumlah 40 orang. Mengingat jumlah populasi berada di bawah 100, digunakan teknik sampel jenuh (total sampling), sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian [6]. Dengan demikian jumlah responden adalah $n = 40$ orang. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju) yang mencakup lima variabel: Sumber Daya Manusia (X1, 7 item), Sistem & TI (X2, 8 item), Prosedur Administrasi (X3, 6 item), Budaya Organisasi (X4, 7 item), dan Keterlambatan Penerbitan SP2D (Y, 7 item). Data sekunder meliputi dokumen SP2D, laporan realisasi anggaran, SOP, dan literatur akademik yang relevan.

Pengujian instrumen meliputi uji validitas dengan kriteria r hitung $> r$ tabel (0,312 untuk $n = 40$, $\alpha = 5\%$) dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha $> 0,60$ [7]. Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), multikolinearitas ($VIF < 10$; Tolerance $> 0,10$), dan heteroskedastisitas (uji Glejser). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan model persamaan: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t parsial ($\alpha = 0,05$; t tabel = 2,030), uji F simultan, serta uji koefisien determinasi (R^2). Seluruh pengolahan data menggunakan SPSS versi 29.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa secara menyeluruh. BPKD berkedudukan di Jl. Masjid Raya No. 34, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, dan memiliki tugas pokok meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD dan APBD Perubahan, pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan piutang dan utang daerah, serta penyusunan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKD Kabupaten Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang, di antaranya Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Proses penerbitan SP2D secara operasional menjadi tanggung jawab Bidang Perbendaharaan yang mengoordinasikan alur dokumen dari SKPD pengaju hingga pencairan dana di kas daerah. Pegawai yang terlibat dalam proses ini berjumlah 40 orang dan menjadi responden dalam penelitian ini.

3.2 Karakteristik Responden

Dari 40 responden, sebanyak 24 orang (60%) berjenis kelamin perempuan dan 16 orang (40%) laki-laki. Berdasarkan usia, kelompok usia 25–35 tahun berjumlah 12 orang (30%), usia 36–45 tahun berjumlah 15 orang (37,5%), usia 46–55 tahun berjumlah 10 orang (25%), dan di atas 55 tahun berjumlah 3 orang (7,5%). Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 29 orang (72,5%), diikuti S2 sebanyak 9 orang (22,5%), dan SMA/ sederajat sebanyak 2 orang (5%). Komposisi responden menunjukkan bahwa BPKD Kabupaten Gowa didominasi pegawai berpendidikan sarjana dan berusia produktif yang memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga penilaian terhadap variabel penelitian dapat dianggap representatif.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	16 (40%)
	Perempuan	24 (60%)
Usia	25-35 Tahun	12 (30%)
	36-45 Tahun	15 (37,5%)
	46-55 Tahun	10 (25%)
	>55 Tahun	3 (7,5%)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	2 (5%)
	S1	29 (72,5%)
	S2	9 (22,5%)

3.3 Analisis Deskriptif Variabel

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap 40 responden, diperoleh gambaran persepsi responden untuk masing-masing variabel penelitian. Variabel Sumber Daya Manusia (X1) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,52 (kategori baik), yang mencerminkan kompetensi dan ketelitian pegawai yang cukup memadai dalam menjalankan tugas penerbitan SP2D. Variabel Sistem & TI (X2) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,69 (kategori baik), menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan yang digunakan dinilai cukup andal dan mudah diakses. Variabel Prosedur Administrasi (X3) memperoleh rata-rata 3,44 (kategori baik namun terendah di antara variabel independen), mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan terutama pada kecepatan proses verifikasi dokumen dan kesederhanaan alur administrasi. Variabel Budaya Organisasi (X4) mendapatkan rata-rata 3,63 (kategori baik), mencerminkan disiplin kerja dan kerja sama tim yang relatif berjalan baik. Sementara variabel

Keterlambatan Penerbitan SP2D (Y) memperoleh rata-rata 3,56, mengindikasikan bahwa keterlambatan masih cukup dirasakan terutama pada aspek revisi dokumen dan durasi verifikasi.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Sumber Daya Manusia (X1)	40	19	29	3,52	2,186
Sistem & TI (X2)	40	23	38	3,69	2,983
Prosedur Administrasi (X3)	40	14	26	3,44	2,074
Budaya Organisasi (X4)	40	20	34	3,63	2,631
Keterlambatan SP2D (Y)	40	21	28	3,56	1,803

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh butir pernyataan pada kelima variabel dinyatakan valid dengan nilai r hitung yang berada di atas r tabel 0,312 (df = 38, $\alpha = 5\%$). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai Pearson Correlation setiap item pernyataan dengan r tabel, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r hitung yang melebihi batas minimum sehingga layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X1)	0,827	> 0,60	Reliabel
Sistem & TI (X2)	0,859	> 0,60	Reliabel
Prosedur Administrasi (X3)	0,791	> 0,60	Reliabel
Budaya Organisasi (X4)	0,843	> 0,60	Reliabel
Keterlambatan SP2D (Y)	0,808	> 0,60	Reliabel

Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Nilai Cronbach's Alpha tertinggi terdapat pada variabel Sistem & TI (0,859) yang menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik, sedangkan nilai terendah terdapat pada variabel Prosedur Administrasi (0,791) yang tetap berada dalam kategori reliabel [7].

3.5 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 (> 0,05), sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa penggunaan metode regresi linear berganda pada data penelitian ini sudah tepat.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Nilai
N	40
Test Statistic	0,108
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Kesimpulan	Berdistribusi Normal

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) seluruh variabel berada di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,10, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara variabel

independen. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk semua variabel, yang berarti model regresi bebas dari heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan terpenuhinya ketiga asumsi klasik tersebut, hasil analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan valid dan dapat diinterpretasikan lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X1)	0,613	1,631	Bebas Multikolinearitas
Sistem & TI (X2)	0,578	1,730	Bebas Multikolinearitas
Prosedur Administrasi (X3)	0,726	1,378	Bebas Multikolinearitas
Budaya Organisasi (X4)	0,609	1,642	Bebas Multikolinearitas

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS 29, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 6,345 + 0,286X1 + 0,144X2 + 0,198X3 + 0,213X4 + e$. Nilai konstanta sebesar 6,345 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, keterlambatan penerbitan SP2D masih akan terjadi pada level tertentu, mencerminkan adanya faktor-faktor lain yang turut berkontribusi. Hasil lengkap analisis regresi dan uji hipotesis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Variabel	B	t hitung	Sig.	t tabel	Keterangan
Konstanta	6,345	2,817	0,008	-	-
SDM (X1)	0,286	2,247	0,031	2,030	Signifikan (H1 Diterima)
Sistem & TI (X2)	0,144	1,518	0,138	2,030	Tidak Signifikan (H2 Ditolak)
Prosedur Adm. (X3)	0,198	1,695	0,099	2,030	Tidak Signifikan (H3 Ditolak)
Budaya Org. (X4)	0,213	2,136	0,040	2,030	Signifikan (H4 Diterima)

$R = 0,729$; $R^2 = 0,531$; $Adj. R^2 = 0,486$; $F = 10,366$; $Sig. F = 0,000$

3.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterlambatan Penerbitan SP2D

Variabel Sumber Daya Manusia (X1) menghasilkan nilai t hitung = 2,247 > t tabel 2,030 dengan signifikansi 0,031 (< 0,05), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Dengan demikian, sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Gowa. Arah positif pada koefisien regresi (B = 0,286) menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas SDM yang meliputi kompetensi teknis, kemampuan penggunaan sistem informasi keuangan, dan ketelitian kerja, maka potensi keterlambatan penerbitan SP2D akan semakin meningkat.

Hasil ini konsisten dengan temuan Eriva et al. (2023) yang menegaskan bahwa kompetensi SDM merupakan determinan utama ketepatan penerbitan SP2D, dan sejalan dengan penelitian Setiawan & Pratiwi (2021) yang menunjukkan bahwa pegawai dengan penguasaan sistem digital keuangan yang rendah cenderung mengalami kesalahan input data dan proses verifikasi yang lebih lambat [3, 8]. Di lingkungan BPKD Kabupaten Gowa, beban kerja yang tinggi terutama pada periode puncak anggaran (akhir triwulan dan akhir tahun) juga menjadi faktor yang memperparah dampak keterbatasan kompetensi SDM terhadap kecepatan penerbitan SP2D.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8707>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kondisi ini menggarisbawahi perlunya investasi berkelanjutan dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis aparatur keuangan daerah.

Pengaruh Sistem dan Teknologi Informasi terhadap Keterlambatan Penerbitan SP2D

Variabel Sistem & TI (X2) menghasilkan nilai t hitung = 1,518 dengan signifikansi 0,138 ($> 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak dan variabel ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keterlambatan penerbitan SP2D. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur teknologi dinilai cukup baik oleh responden (rata-rata 3,69), keberadaan sistem saja tidak serta-merta mengurangi keterlambatan apabila tidak disertai kesiapan pengguna dan dukungan manajemen yang memadai.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Riyanto & Hidayah (2020) yang menekankan pentingnya user readiness dalam implementasi sistem digital keuangan daerah, serta temuan Puspitasari & Rachman (2021) yang menunjukkan bahwa hambatan teknis dalam implementasi SP2D elektronik tidak selalu berasal dari ketersediaan sistem, melainkan dari kesiapan pengguna dan kelengkapan infrastruktur pendukung [9, 10]. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa BPKD Kabupaten Gowa telah memiliki infrastruktur TI yang relatif memadai, namun pemanfaatan sistem tersebut oleh pegawai belum optimal, sehingga kontribusinya dalam mengurangi keterlambatan belum terlihat secara statistik pada penelitian ini.

Pengaruh Prosedur Administrasi terhadap Keterlambatan Penerbitan SP2D

Variabel Prosedur Administrasi (X3) memperoleh nilai t hitung = 1,695 dengan signifikansi 0,099 ($> 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Meskipun prosedur administrasi memiliki arah positif terhadap keterlambatan, pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik dalam penelitian ini. Rata-rata tanggapan responden sebesar 3,44 mengindikasikan bahwa SOP yang berlaku di BPKD Kabupaten Gowa dinilai cukup jelas dan dipatuhi oleh mayoritas pegawai. Namun tantangan utama bukan pada kejelasan prosedur itu sendiri, melainkan pada kecepatan eksekusi di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh faktor SDM dan kualitas koordinasi antarpejabat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Rochman & Dewi (2022) yang menemukan bahwa evaluasi efisiensi prosedural di Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa kompleksitas alur administrasi penerbitan SP2D seringkali lebih dipengaruhi oleh pola koordinasi antarpejabat daripada oleh desain prosedur itu sendiri [11]. Dalam konteks BPKD Kabupaten Gowa, peluang percepatan prosedur administrasi dapat diwujudkan melalui digitalisasi sistem verifikasi dan penyederhanaan rantai birokrasi, khususnya pada tahap verifikasi dokumen SPM yang sering menjadi bottleneck dalam proses penerbitan SP2D.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keterlambatan Penerbitan SP2D

Variabel Budaya Organisasi (X4) menghasilkan nilai t hitung = 2,136 $>$ t tabel 2,030 dengan signifikansi 0,040 ($< 0,05$), sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Dengan demikian, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Gowa. Koefisien regresi sebesar 0,213 mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang lemah, khususnya pada aspek disiplin kerja dan komitmen penyelesaian tugas tepat waktu, berkontribusi terhadap meningkatnya keterlambatan penerbitan SP2D.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Astuti (2019) yang menemukan bahwa budaya kerja yang kurang disiplin, lemahnya sistem pengawasan internal, dan rendahnya motivasi pegawai memperlambat proses pelayanan di sektor keuangan daerah [12]. Penelitian Sari & Nugroho (2020) juga mengkonfirmasi bahwa disiplin dan tanggung jawab aparatur merupakan prediktor signifikan ketepatan waktu dalam administrasi pemerintahan daerah [13]. Di BPKD Kabupaten Gowa, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja dan ketepatan waktu perlu diperkuat melalui mekanisme supervisi yang konsisten, penetapan target waktu penyelesaian yang terukur, serta sistem reward dan punishment yang adil.

Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi

Uji F (simultan) menghasilkan nilai F hitung = 10,366 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang berarti bahwa secara bersama-sama sumber daya manusia, sistem & TI, prosedur administrasi, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Gowa. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,531 atau 53,1% menunjukkan bahwa keempat variabel independen dalam model mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi pada variabel keterlambatan penerbitan SP2D. Sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kepemimpinan manajerial, tekanan audit eksternal, atau variabel lingkungan kelembagaan lainnya.

Hasil uji simultan ini menegaskan bahwa keterlambatan penerbitan SP2D merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal saja. Strategi penanganan yang efektif harus bersifat komprehensif dan menyangkut seluruh dimensi secara bersamaan, mulai dari peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem TI, penyederhanaan prosedur administrasi, hingga penguatan budaya organisasi yang disiplin

dan berorientasi hasil. Temuan ini mengkonfirmasi urgensi pendekatan holistik dalam reformasi birokrasi keuangan daerah [14, 15].

3.8 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen keuangan publik dengan menguji secara empiris faktor-faktor multidimensional yang mempengaruhi keterlambatan penerbitan SP2D pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gowa. Temuan bahwa SDM dan budaya organisasi merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan sistem TI dan prosedur administrasi memberikan perspektif baru yang penting bagi pengembangan literatur administrasi keuangan daerah.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah prioritas bagi BPKD Kabupaten Gowa. Pertama, mengintensifkan program pelatihan teknis yang menasar kompetensi penggunaan SIPD, SPAN, dan regulasi keuangan daerah terkini bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan SP2D. Kedua, membangun sistem monitoring ketepatan waktu penerbitan SP2D berbasis dashboard yang dapat diakses secara real-time oleh pimpinan dan staf, sehingga penyimpangan terhadap standar waktu dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Ketiga, memperkuat budaya organisasi melalui penetapan indikator kinerja individu yang mencantumkan dimensi ketepatan waktu, serta menerapkan mekanisme reward bagi pegawai atau unit yang konsisten memenuhi standar waktu penerbitan SP2D. Keempat, melakukan simplifikasi prosedur verifikasi dokumen melalui digitalisasi penuh rantai persetujuan agar mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap penundaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh sumber daya manusia, sistem dan teknologi informasi, prosedur administrasi, dan budaya organisasi terhadap keterlambatan penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 40 responden menggunakan SPSS 29, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penerbitan SP2D dengan nilai $F = 10,366$ (sig. 0,000) dan mampu menjelaskan 53,1% variasi pada variabel dependen ($R^2 = 0,531$). Secara parsial, sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,247$; sig. 0,031) dan budaya organisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,136$; sig. 0,040) terhadap keterlambatan penerbitan SP2D. Sebaliknya, sistem dan teknologi informasi ($t = 1,518$; sig. 0,138) serta prosedur administrasi ($t = 1,695$; sig. 0,099) tidak berpengaruh signifikan secara parsial dalam penelitian ini. Temuan ini mengimplikasikan bahwa upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan disiplin kerja, dan pembinaan budaya organisasi yang berorientasi kinerja merupakan prioritas utama untuk mempercepat penerbitan SP2D di BPKD Kabupaten Gowa. Penyederhanaan prosedur administrasi dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan perlu dilakukan secara paralel untuk menciptakan ekosistem birokrasi keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel. Penelitian lanjutan disarankan untuk mempertimbangkan variabel moderasi seperti kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan tekanan audit eksternal guna memperluas cakupan eksplorasi faktor penentu keterlambatan SP2D.

Referensi

- [1] Kementerian Keuangan RI. (2023). Standar Layanan Perbendaharaan Negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- [2] BPK RI. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Sulawesi Selatan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- [3] C. Y. Eriva, T. Rudianto, and A. Mizlina, "Pengaruh Kualitas SDM dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penerbitan SP2D pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh," *Jurnal Akuntansi Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 112–125, 2023.
- [4] M. Madsani and M. As'ad, "Analisis Efektifitas Penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah," *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, vol. 6, no. 2, pp. 64–69, 2025.
- [5] I. Y. Pertiwi, S. Y. A. Putri, and M. Yani, "Pengaruh SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Economic Public Journal of Accounting*, vol. 5, no. 1, pp. 22–34, 2025.
- [6] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [7] I. Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] A. Setiawan and D. Pratiwi, "Kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Digital," *Jurnal Akuntabilitas Publik dan Keuangan Negara*, vol. 8, no. 3, pp. 101–112, 2021.
- [9] B. Riyanto and N. Hidayah, "Kesiapan Pengguna dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan," *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Negara*, vol. 5, no. 1, pp. 33–45, 2020.
- [10] L. Puspitasari and D. Rachman, "Hambatan Teknis dalam Implementasi Sistem SP2D Elektronik pada Pemerintah Daerah," *Jurnal Teknologi dan Administrasi Publik*, vol. 8, no. 3, pp. 92–104, 2021.
- [11] A. Rochman and R. Dewi, "Evaluasi Efisiensi Prosedural dalam Pengelolaan SP2D di Pemerintah Kota Surabaya," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 22–34, 2022.

- [12] R. Astuti, "Budaya Kerja Birokrasi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Sektor Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 19, no. 2, pp. 87–102, 2019.
- [13] P. Sari and A. Nugroho, "Disiplin dan Tanggung Jawab Aparatur dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Daerah," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pemerintah*, vol. 7, no. 4, pp. 87–96, 2020.
- [14] A. Halim. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- [15] S. P. Robbins and T. A. Judge. (2021). *Organizational Behavior* (18th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- [18] A. Susanto, "Strategi Reformasi Prosedur Keuangan Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran," *Jurnal Kebijakan Keuangan dan Tata Kelola Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 11–25, 2024.
- [19] R. H. Purwanti and H. Syafrizal, "Analisis Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah*, vol. 6, no. 2, pp. 29–38, 2018.
- [20] A. Wibowo, "Efisiensi Birokrasi Keuangan melalui Optimalisasi Penerbitan SP2D Elektronik," *Jurnal Keuangan Negara dan Daerah*, vol. 6, no. 4, pp. 72–84, 2021.